

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, pembangunan dan kemakmuran rakyat yang lebih baik akan selalu dilakukan oleh setiap negara. Setiap negara selalu memiliki cara yang berbeda dalam melakukan upaya peningkatan tersebut, seperti menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Dalam melakukan penarikan investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Terdapat asumsi bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam mengarahkan hal tersebut, minimnya modal dan teknologi yang menjadi suatu dasar untuk menuju industrialisasi menjadi suatu permasalahan yang memang sejak awal telah dihadapi oleh negara-negara tersebut. Satu-satunya cara dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengundang masuknya modal asing dari beberapa negara maju ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, serta butuh adanya modal atau investasi dalam jumlah besar. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka sejak itu pula kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai. Harapannya adalah agar investor domestik maupun asing dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Iklim investasi yang bersifat kondusif sangat mempengaruhi penarikan arus modal negara. Iklim tersebut meliputi aturan kelembagaan dan lingkungan dalam situasi kini maupun nanti,

yang juga mampu mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.

Batam merupakan gerbang masuknya investasi, baik lokal maupun asing di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Batam juga merupakan pelayan bagi pelaku investasi luar maupun dalam negeri, yang akan menanamkan modalnya di Batam. Ketertarikan investor pada Batam dalam berinvestasi adalah karena keunggulan yang Batam miliki, baik secara geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, maupun ekonomi, yang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi.¹ Batam adalah suatu kawasan yang merupakan kawasan perdagangan bebas. Sehingga, perusahaan dengan orientasi ekspor akan diuntungkan bila melangsungkan usahanya di Batam. Ditambah lagi, Batam berjarak dengan Singapura hanya sekitar 20 km, sehingga akses terhadap finansial global tentunya akan lebih mudah. Selain itu, ditetapkannya Batam sebagai daerah FTZ (*Free Trade Zone*) melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB), mampu menjadikannya terobosan baru guna meningkatkan daya saing regional dan dinamika global serta mendorong tumbuhnya investasi². Sejak FTZ ditetapkan di Batam, Pemerintah Pusat telah menetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang lebih dikenal dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan *Free Trade Zone*. Selain memberikan kepastian hukum kepada para investor selama itu untuk berinvestasi di Batam, BP Batam berupaya

¹ Kuncoro, M. 2005. "Menanti Reformasi Iklim Bisnis Indonesia". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial-UNISIA*, No. 55/XXVIII/1/2005

² Ibid.

memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat meningkatkan daya saing Batam agar dapat menarik investor asing ke Indonesia.

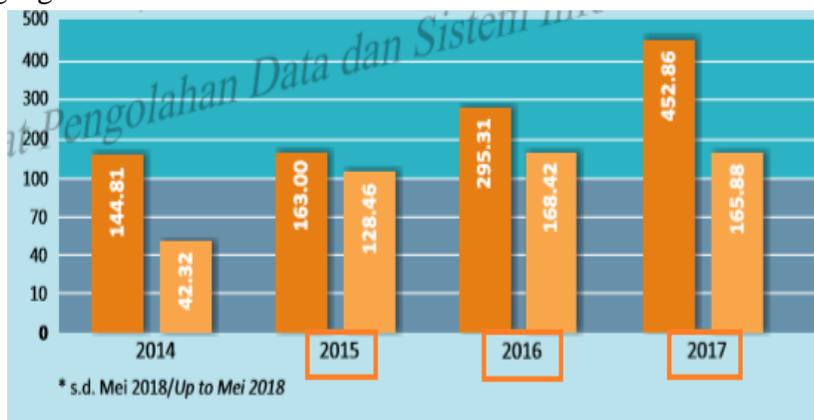
Namun, upaya BP Batam selaku pemerintah pusat yang bertugas mempromosikan Kota Batam ke dalam maupun luar negeri, dalam menarik investor, khususnya investor asing ke Batam, tidaklah selalu mudah bila hanya mengandalkan terobosan tersebut. Selain kelemahan infrastruktur, proses perizinan yang kurang mendukung investasi karena untuk memperoleh izin terbilang lama di tahun 2015. Isu perizinan menjadi sangat krusial di pulau berbasis investasi seperti Batam. Calon investor menuntut kepastian, sehingga hal tersebut menjadi kendala utama, dan mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif dan Batam kalah bersaing dengan kawasan industri lain, seperti Penang dan Johor Baru di Malaysia yang justru mengalami kemajuan. Sekitar tahun 2015 dan 2016 terdapat 110 perusahaan asing di Batam telah berhenti beroperasi. Tren ini makin terus berlanjut dengan adanya 53 perusahaan menyusul berhenti beroperasi di awal tahun 2017.³

Dalam upaya mencapai tujuan pengembangan Batam sebagai daerah industri, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik untuk memudahkan kelancaran investasi berupa infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, waduk, dsb). Sedangkan pembangunan non-fisik dilakukan untuk menarik minat investor, berupa kemudahan fasilitas. Hal ini berdasarkan pada peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 tentang tugas dan fungsi BP Batam. Tugas tersebut yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan,

³ Purba, D. 2018. Faktor Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam. Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) 1, 23 Agustus 2018. Batam. Indonesia.

dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Sementara, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan kegiatan penanaman modal.⁴ Karenanya, jajaran pimpinan BP Batam sempat diganti oleh Kemenko Perekonomian dari arahan Presiden dengan menugaskan pimpinan BP Batam yang baru untuk meningkatkan lebih lagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam dengan berbagai macam pembenahan agar mampu bersaing dengan dengan daerah lain yang memiliki status yang sama dengan Batam.

Realisasi investasi PMA di Batam berdasarkan LKPM 2015 – 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam⁵, nilai dari setiap tahun nya mengalami peningkatan yang signifikan.



Gambar 1. 1 Nilai Realisasi Investasi Asing di Batam tahun 2015-2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa peningkatan investasi PMA di Batam dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, investasi asing sekitar US\$ 291.46 juta terbagi menjadi US\$ 163.00 juta

⁴ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 tentang tugas dan fungsi BP Batam. Diakses di <https://bpbatam.go.id/pages/read/52-tugas-dan-fungsi> pada 20 September 2019.

⁵ Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 10

untuk perusahaan asing baru dan US\$ 128.46 juta perluasan usaha/ekspansi. Kemudian meningkat di tahun 2016, yaitu US\$ 463,73 juta terbagi menjadi US\$ 295.31 juta untuk perusahaan asing baru dan US\$ 168.42 juta perluasan usaha/ekspansi. Makin meningkat di tahun 2017, yaitu US\$ 618.74 juta yang terbagi menjadi US\$ 452.86 juta untuk perusahaan asing baru dan US\$ 165.88 juta perluasan usaha/ekspansi . Selain itu, ekspansi atau perluasan usaha terbilang stabil. Meningkatnya investasi asing di Batam dari rentang waktu 2016-2017 ditandai dengan adanya lebih dari 700 perusahaan asing yang beroperasi⁶ dan tersebar di 22 kawasan industri di Kota Batam. Dari grafik yang dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa fakta yang ada adalah terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya investasi asing di Batam dari tahun 2015-2017. Data di atas mencakup beberapa sektor, seperti sektor pariwisata dan industri.

Di tahun 2013, nilai realisasi investasi asing di Batam adalah sekitar US\$ 156.21 juta dan US\$ 187.13 juta di tahun 2014. Dari ke dua tahun tersebut, nilai realisasi investasi asing di Batam dapat dikatakan sangat rendah. Namun, mulai meningkat di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2015 hingga 2017. Dengan demikian, beberapa hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan investasi asing di Batam meningkat tahun 2015-2017 dan menjadikannya suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut ini : (1) Data yang diperoleh adalah data dari 2015 hingga 2017; (2) Lokasi penelitian adalah

⁶ Ibid.

Direktorat Promosi Dan Humas, Gedung Marketing Center, BP Batam,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Apa Faktor-Faktor Penyebab Investasi Asing Meningkat di Batam Tahun 2015-2017?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan investasi asing di Batam meningkat pada tahun 2015-2017.
2. Penulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister strata dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Menjawab inti permasalahan dan menguji jawaban sementara atau hipotesa yang diajukan penulis.
4. Untuk menambah wawasan baru dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan dibangku kuliah dan mengaplikasikannya pada suatu fenomena.

E. Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat , seperti :

1. Menyajikan data ilmiah terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan investasi asing di Batam meningkat pada tahun 2015-2017.
2. Memunculkan pemahaman baru terkait dengan strategi promosi yang digunakan BP Batam dalam meningkatkan investasi asing di Batam tahun 2015-2017.

F. Studi Pustaka

Penulis juga melakukan pencarian tentang penelitian atau riset dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian. Penelusuran awal telah menghasilkan beberapa literatur sebagai berikut.

Pertama, sebuah jurnal berjudul Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”) yang ditulis oleh Romayati Apriliyanti dari Universitas Riau.⁷ Dalam jurnal ini membahas Diplomasi Indonesia dalam meningkatkan investasi asing di Kota Batam dengan program Tur Diplomatik pada 7-9 September 2012. Tur Diplomatik adalah program Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mempromosikan potensi di beberapa wilayah di Indonesia untuk memperkenalkan dunia. Program ini dihadiri lebih dari 30 duta asing dan ini menjadi kebanggaan, karena pada saat program tersebut diadakan di Yogyakarta dan Gorontalo hanya dihadiri oleh 20 duta asing saja. Tidak hanya untuk saling mengenal antar *personality*, namun program ini juga untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi secara langsung tersebut, yaitu berupa kerjasama bisnis secara kongkrit. Program ini berdampak positif terhadap perkembangan jumlah investasi dan berkontribusi terhadap kehidupan perekonomian bagi beberapa kalangan, baik pengusaha lokal dan asing, pemerintah dan penduduk setempat, yang berpeluang besar dalam lapangan pekerjaan. Di tahun 2013, total investasi swasta lebih dominan dibandingkan dengan investasi pemerintah, dan lebih dari separuh dari total investasi swasta dikuasai oleh investasi swasta asing atau PMA.

⁷ Apriliyanti, R. Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”). Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 2 No. 1 Februari 2015.

Kedua, adalah dalam jurnal berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam yang ditulis oleh Muhammad Zaenuddin dari Polteknik Batam.⁸ Jurnal ini menganalisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pada keputusan investasi di Batam dengan menggunakan data kuantitatif sekunder untuk menjadi penentu FDI di kawasan industri tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan data panel dari 16 area industri selama 3 tahun (2005-2007). Variabel independen adalah tarif sewa, biaya perawatan, pasokan tenaga kerja, nilai ekspor dan listrik. Hasil yang dapat disimpulkan adalah analisis regresi menunjukkan bahwa variabel biaya pemeliharaan, tenaga kerja dan ekspor secara statistik mempengaruhi FDI di Batam, sedangkan variabel tarif sewa dan listrik tidak berpengaruh signifikan.

Ketiga, artikel jurnal berjudul Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing di Badan Pengusahaan Kota Batam yang ditulis oleh Yenni Christina Marbun dan Utami Dewi dari Universitas Negeri Yogyakarta.⁹ Penelitian ini berasumsi bahwa peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pelayanan publik adalah hal yang penting karena akan menguntungkan banyak pihak, salah satunya terkait dengan investasi asing. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik di Badan Penanaman Modal Asing Badan Pengusahaan Kota Batam dapat dinilai dari lima dimensi, yaitu *tangibles* (berwujud) belum memenuhi indikator kenyamanan tempat pelayanan serta kedisiplinan pegawai, *reliability* (kehandalan) sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pengguna layanan, *responsiviness* (ketanggapan) sudah memenuhi indikator kehandalan dalam pelayanan, *assurance* (jaminan)

⁸ Zaenuddin, M. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam. Politeknik Batam. JEJAK, Volume 2, Nomor 2, September 2009.

⁹ Marbun, C.P & Dewi, U. berjudul Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing di Badan Pengusahaan Kota Batam. MPP. Universitas Negeri Yogyakarta.

penyedia layanan belum dapat memberikan jaminan tepat waktu, *and empathy* (empati) seluruh indikator penilaian sudah dilaksanakan. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan perizinan penanaman modal asing di Kota Batam muncul dari eksternal dan internal. Faktor internal seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan faktor eksternalnya adalah ketidaktahuan calon investor terhadap berkas atau syarat yang ditentukan dalam proses pelayanan.

Keempat, artikel jurnal berjudul Motivasi dan Kendala Investasi di Batam yang ditulis oleh Muhammad Zaenuddin dari Politeknik Batam.¹⁰ Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motivasi dan hambatan investasi serta untuk menganalisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pada keputusan investasi dalam kawasan industri di Batam. Penulis menjadikan 25 perusahaan dan manajemen dari 8 kawasan industri dipilih sebagai responden menggunakan *convenience sampling*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi utama memilih lokasi investasi di Batam adalah faktor tenaga kerja, biaya, administrasi perizinan, pentingnya insentif pajak, pentingnya FTZ di Batam, hubungan dengan Singapura dan faktor pasar. Alasan lainnya adalah tersedianya tenaga ahli dan tenaga kerja wanita, listrik, ekspor dan akses ke daerah.pasar global, biaya sewa dan juga fasilitas pelabuhan. Sementara itu, kendala investasi adalah urusan administrasi dan perizinan juga ketidakpastian implementasi FTZ di Batam. Sedangkan menurut manajemen kawasan industri, kendala investasi yang perlu dikoreksi adalah masalah birokrasi, biaya tinggi ekonomi, perpajakan, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan masalah tanah.

¹⁰ Zaunuddin, M. Motivasi dan Kendala Investasi di Batam. Politeknik Batam. Vol 1 (1), 2009.

Kelima, dalam buku Simanjuntak (2013) berjudul *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*¹¹, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang memiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Selain itu, Simanjuntak (2013)¹² mendefinisikan pula otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerah dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undang.

Adapun inti dari apa yang didefinisikan oleh Simanjuntak tersebut erat kaitannya dengan investasi adalah bahwa pengaturan otonomi daerah dapat dengan cepat menjadikan suatu pemerataan kesejahteraan dengan memberi kesempatan kepada kepala daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Daerah otonom tidak hanya melakukan deregulasi, karena stabilitas yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan investasi ada pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memudahkan perkembangan ekonomi dan membantu para investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala

¹¹ Bungaran Antonius Simanjuntak. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 66 & 70.

¹² Ibid.

tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan berdampak pada minat investor dalam berinvestasi.

Berikut adalah tabel rangkuman yang berisi studi pustaka yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penulisan ini :

Tabel 1. 1 Studi Pustaka tentang strategi BP Batam dalam menarik investor asing ke Batam

No	Nama, Tahun Terbit, Institusi dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Romayati Apriliyanti. Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 2 No. 1 Februari 2015. Judul : Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”)	<p>a. Tur Diplomatik adalah program Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mempromosikan potensi di beberapa wilayah di Indonesia untuk memperkenalkan dunia.</p> <p>b. Program ini tidak hanya untuk saling mengenal antar <i>personality</i> namun juga untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi secara langsung tersebut, yaitu berupa kerjasama bisnis secara kongkrit.</p> <p>c. Program ini berdampak positif terhadap perkembangan jumlah investasi dan berkontribusi terhadap kehidupan perekonomian bagi beberapa kalangan baik pengusaha lokal dan asing, pemerintah dan penduduk setempat, yang berpeluang besar dalam lapangan pekerjaan.</p>
2.	Muhammad Zaenuddin. Polteknik Batam. JEJAK, Volume 2, Nomor 2, September 2009. Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam.	d. Jurnal ini menganalisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pada keputusan investasi di Batam dengan menggunakan data kuantitatif sekunder untuk menjadi penentu FDI di kawasan industri tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan data panel dari 16 area industri selama 3 tahun (2005-

No	Nama, Tahun Terbit, Institusi dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>2007).</p> <p>e. Variabel independen adalah tarif sewa, biaya perawatan, pasokan tenaga kerja, nilai ekspor dan listrik.</p> <p>f. Hasil yang dapat disimpulkan adalah analisis regresi memperlihatkan adanya sejumlah variabel biaya pemeliharaan, tenaga kerja dan ekspor secara statistik mempengaruhi FDI di Batam, sedangkan variabel tarif sewa dan listrik tidak berpengaruh signifikan.</p>
3.	<p>Yenni Christina Marbun dan Utami Dewi. MPP . Universitas Negeri Yogyakarta. Judul : Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing di Badan Pengusahaan Kota Batam.</p>	<p>g. Penelitian ini berasumsi bahwa peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pelayanan publik adalah hal yang penting karena akan menguntungkan banyak pihak, salah satunya terkait dengan investasi asing.</p> <p>h. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik di Badan Penanaman Modal Asing Badan Pengusahaan Kota Batam dapat dinilai dari lima dimensi, yaitu <i>tangibles</i> (berwujud) belum memenuhi indikator kenyamanan tempat pelayanan serta kedisiplinan pegawai, <i>reliability</i> (kehandalan) sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pengguna layanan, <i>responsiviness</i> (ketanggapan) sudah memenuhi indikator kehandalan dalam pelayanan, <i>assurance</i> (jaminan) penyedia layanan belum dapat memberikan jaminan tepat waktu,</p>

No	Nama, Tahun Terbit, Institusi dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<p><i>and empathy</i> (empati) seluruh indikator penilaian sudah dilaksanakan.</p> <p>i. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan perizinan penanaman modal asing di Kota Batam muncul dari eksternal dan internal. Faktor internal seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan faktor eksternalnya adalah ketidaktahuan calon investor terhadap berkas atau syarat yang ditentukan dalam proses pelayanan.</p>
4.	<p>Muhammad Zaenuddin. Politeknik Batam. Vol 1 (1), 2009. Judul : Motivasi dan Kendala Investasi di Batam</p>	<p>j. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motivasi dan hambatan investasi serta untuk menganalisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pada keputusan investasi dalam kawasan industri di Batam.</p> <p>k. Penulis menggunakan 25 perusahaan dan manajemen dari 8 kawasan industri dipilih sebagai responden menggunakan <i>convenience sampling</i>.</p> <p>l. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi utama memilih lokasi investasi di Batam adalah faktor tenaga kerja, biaya, administrasi perizinan, pentingnya insentif pajak, pentingnya FTZ di Batam, hubungan dengan Singapura dan faktor pasar. Alasan lainnya adalah tersedianya tenaga ahli dan tenaga kerja wanita, listrik, ekspor dan akses ke daerah.pasar global, biaya sewa dan juga fasilitas pelabuhan.</p>

No	Nama, Tahun Terbit, Institusi dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		m. Kendala investasi adalah urusan administrasi dan perizinan juga ketidakpastian implementasi FTZ di Batam. Sedangkan menurut manajemen kawasan industri, kendala investasi yang perlu dikoreksi adalah masalah birokrasi, biaya tinggi ekonomi, perpajakan, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan masalah tanah.
5	Bungaran Antonius Simanjuntak. 2013. Judul Buku : Dampak Otonomi Daerah di Indonesia. Hlm. 66 & 70.	n. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. o. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang memiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. p. Inti : kaitannya dengan investasi adalah bahwa pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada kepala daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing.

Berdasarkan ke lima tinjauan pustaka yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini penulis mengembangkan salah satu diantara ke lima tinjauan pustaka tersebut. Yaitu, artikel jurnal yang ditulis oleh Yenni Christina Marbun dan Utami Dewi dengan judul artikel Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing di Badan Pengusahaan Kota Batam. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dapat dilihat dari beberapa perspektif, namun juga terdapat persamaan. Dalam artikel jurnal tersebut berasumsi bahwa peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pelayanan publik, seperti memberikan kemudahan perizinan investasi adalah hal yang menjadi faktor penyebab meningkatnya investasi asing di Batam dan hanya berfokus pada bagaimana kualitas pelayanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, selaku instansi yang melayani calon pelaku usaha asing. Penulis dalam jurnal tersebut menjabarkan tren investasi dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Sementara, penulis dalam penelitian ini menganalisis terdapat lebih dari satu faktor penyebab investasi asing meningkat di Batam, dengan tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dalam kurun waktu 2015-2017. Kesamaan antara jurnal dan penelitian ini adalah penulis menjadikan Badan Pengusahaan (BP) Batam subjek penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait faktor-faktor penyebab investasi asing meningkat di Batam tahun 2015-2017.

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Otonomi Daerah

Secara etimologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Widjaja (2005) mengatakan

bahwa Daerah Otonomi adalah Daerah yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹³ Menurut Bagir (2002)¹⁴ mendefinisikan otonomi merupakan sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan Negara administrasi Negara. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka konsep otonomi daerah, status kota Batam sebagai zona bebas dimengerti sebagai fasilitas istimewa kepabeanan dan perpajakan (*customs and tax privileged facility*) yang diberikan pemerintah pusat kepada kota Batam. Hal ini dimungkinkan oleh kewenangan pemerintah pusat dalam bidang moneter dan fiskal, sesuai Ayat (1), Pasal 7, UU No.22/1999. Pada dasarnya fasilitas istimewa tersebut diberikan sesuai dengan semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam hal ini keunggulan lokal wilayah kota Batam (sesuai UU No.53/1999). Dalam kerangka konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitas yang diberikan pemerintah pusat kepada kota Batam adalah bagian dari instrumen dan mekanisme pengembangan ekonomi nasional, yang antara lain

¹³ HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 133.

¹⁴ Bagir Manan. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian I*. Penerbit Penataan Administratif Organisation Planning. UGM. Yogyakarta.

meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara mikro. Hal ini dimungkinkan oleh kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dalam bidang lain, sesuai Ayat (2) Pasal 7 UU No.22/1999.

Status kota Batam sebagai zona bebas tidak bertentangan dengan jiwa otonomi daerah sepanjang penerapan status tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip otoritas daerah otonomi kota Batam untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Batam sebagai zona bebas adalah perpaduan antara kepentingan pemerintah pusat (dalam kerangka konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan kepentingan masyarakat Batam (dalam konsep kerangka konsep otonomi daerah), pada bidang dan kewenangan masing-masing.

2. Konsep Infrastruktur

Sejauh ini, belum ada kesepakatan mengenai definisi dari infrastruktur. Definisi infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Secara umum diketahui sebagai fasilitas berupa jalan, rumah sakit, jembatan, sanitasi dan sebagainya. Menurut ekonomi infrastruktur adalah wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan¹⁵.

Menurut Grigg (1998)¹⁶, infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung,

¹⁵ Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

¹⁶ Grigg, N. 1998. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons.

fasilitas publik lainnya, yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara tatanan sosial dan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan¹⁷.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non-fisik. Menurut Kuncoro (2010)¹⁸ pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non-fisik menurut Wresniwiro (2012) adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, misalnya kemudahan fasilitas.¹⁹

Sehubungan dalam penelitian ini, infrastruktur yang ada di Kota Batam dari tahun ke tahun, utamanya 2015-2017 terus ditambah dan diperbaiki. Mengingat Kota Batam adalah salah satu tujuan berinvestasi terbesar di Indonesia, dan salah satu kendala investor asing dalam berinvestasi di Batam adalah minimnya infrastruktur, maka pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Batam. Adapun peningkatan dan perbaikan infrastruktur tersebut mencakup sosial dan ekonomi, dimana infrastruktur mampu

¹⁷ Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

¹⁸ Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.

¹⁹ Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta. Visimedia.

memberikan dampak langsung mengenai penurunan maupun peningkatan investasi asing.

3. Konsep Penanaman Modal Asing atau Investasi Asing

Berdasarkan pengertian Fitzgerald²⁰, konsep investasi asing dipahami sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat ini dimana nantinya barang modal tersebut akan dihasilkan pada masa yang akan datang dengan mengeluarkan barang modal melalui produk yang baru.

Dalam buku Krugman & Obsfeld²¹, Penanaman Modal Asing merupakan aliran modal internasional dimana suatu perusahaan di suatu negara mendirikan atau memperluas cabang perusahaan di negara lain. PMA dapat berupa *greenfield*, yaitu dengan membuka pabrik baru atau cabang perusahaan baru di negara lain, merger dengan perusahaan asing maupun dengan mengakuisisi perusahaan asing maupun domestik yang sudah ada di negara lain.

Dalam jurnal Maria Timbernian yang berjudul Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata²² disebutkan bahwa UU No.25 Tahun 2007 mencakup poin penting dalam mengatasi masalah serius yang kerap kali dihadapi calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di

²⁰ Fitzgerald, E.V.K, 1978. *Public Sector Investment Planning for Developing Country*. First Edition, The MacMillan India Press Ltd, Madras.

²¹ Krugman and Obsfeld. 2003. *International Economics, Theory and Policy*. Sixth Edition. Boston.

²² E Journal Unsrat. Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata. <http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/polotico/article/download/10310> diakses pada 19 September 2019.

Indonesia. Bab 1 Pasal 1 ayat 10 mencantumkan hal tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau limpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Menurut jurnal tersebut, sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan calon investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia kemudian tidak membutuhkan waktu lama untuk memperoleh izin usaha. Selain itu, calon investor juga dimudahkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena adanya biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha. Berkaitan dengan itu, menurut kasus dalam penelitian ini, investasi asing adalah salah satu unsur penggerak penting guna meningkatkan perekonomian dan melakukan pembangunan di daerah, utamanya di Kota Batam. Beberapa potensi yang dimiliki Kota Batam hanya dapat digerakkan secara maksimal melalui adanya dukungan dari investasi, utamanya investasi asing. Dalam berinvestasi di Batam, proses perizinan bagi investor asing adalah salah satu hal yang krusial. Dengan demikian, BP Batam terus mengupayakan agar investor mudah dalam melakukan proses perizinan.

H. Hipotesa

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua (2) faktor penyebab meningkatnya investasi asing di Batam tahun 2015-2017.

1. Deregulasi
 - a. Memanfaatkan pilihan fasilitas investasi, Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2. Infrastruktur
 - a. Pembangunan Fisik : Perbaikan dan penambahan infrastruktur, seperti dibangunnya mall pelayanan publik, *flyover* atau jembatan layang, dan menambah jumlah waduk (dam) di Kota Batam sebagai sumber air bersih bagi masyarakat umum maupun industri.
 - b. Pembangunan Non – Fisik : Membentuk program dari BKPM pusat yang dilanjutkan oleh BP Batam, yaitu KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) i23J (Izin Investasi 3 Jam) untuk memudahkan perizinan investor asing dalam melakukan kegiatan penanaman modal.

I. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan sejumlah data yang dikumpulkan dari sarana yang beragam. Penelitian kualitatif berupaya membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas.²³

²³ Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

1. Unit Analisa

Melihat dari objek penelitian yang dianalisa oleh penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini adalah Direktorat Promosi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Gedung Marketing Center Batam Center.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian pustaka/kepuustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data dari perpustakaan maupun internet yang berupa literatur ataupun dokumen tertulis yang dijadikan sumber dan dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, media yang dilakukan dan dibaca oleh peneliti.²⁵ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan konsep strategi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Syamsul (2009:96) dalam “Strategi Pembangunan Nasional” dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi²⁶, yaitu :

²⁴ Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 30

²⁵ M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 82

²⁶ Hadi, Syamsul. 2009. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

- a. Apa-apa yang akan dilaksanakan?
- b. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa.
- c. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau dalam mengoperasionalkan strategi?
- d. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi?
- e. Lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut?
- f. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut?

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²⁷

4. Teknis Analisis Data

Kombinasi teknik deduktif – induktif diaplikasikan dalam penulisan ini. Deduktif digunakan karena penjelasan berawal dari kerangka pemikiran atau konseptual atau teori. Kerangka pemikiran atau konseptual yang diasumsikan bersifat umum kemudian dijabarkan ke permasalahan yang bersifat khusus dan kontekstual.²⁸ Sedangkan induktif digunakan untuk menyimpulkan atau menggeneralisasi setelah melihat fakta-fakta yang berkaitan dan mendukung kerangka pemikiran atau konseptual yang diasumsikan. Kerangka ini yang nantinya akan membawa pengumpulan data yang relevan dan arah pembahasan dalam penulisan ini.

²⁷ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 225

²⁸ Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 79-81

J. Sistematika Penulisan

Bab I: membahas tentang latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi riset, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas selanjutnya.

Bab II : memaparkan terkait potensi Kota Batam dan investasi asing di Batam. Terdapat penjelasan mengenai investasi asing di Indonesia, potret Kota Batam, mulai dari kondisi geografis dan geologis agar terlihat peluang Kota Batam yang menjadikannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian, akan dilanjutkan dengan potensi dan peluang Kota Batam yang menjadikannya tujuan investasi dari berbagai sektor, seperti industri dan pariwisata dan bab ini akan diakhiri dengan pemaparan terkait investasi asing di Batam.

Bab III : memaparkan mengenai tren atau pasang surut investasi asing di Batam dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Di dalam bab ini juga akan dipaparkan kendala investasi asing di Batam. Bab ini akan diakhiri dengan membahas isu dualisme pembangunan di Batam yang mempengaruhi investasi.

Bab IV : memaparkan secara singkat tentang arah kebijakan investasi di Batam tahun 2013-2014 untuk meningkatkan investasi asing di tahun berikutnya. Kemudian, menjabarkan faktor-faktor penyebab meningkatnya investasi asing di Batam dalam kurun waktu 2015 – 2017.

Bab V : membahas kesimpulan dari seluruh pemaparan yang telah dibahas dan dipaparkan dalam bab sebelumnya.